

BAB III

DINAMIKA TKI KE MALAYSIA PADA TAHUN 2013-2015

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang hal yang mendasari TKI untuk bekerja diluar negeri, hal yang mendasari TKI memilih Malaysia sebagai tujuan untuk bekerja, dan permasalahan yang terjadi pada TKI di Malaysia dari tahun 2013 hingga 2015.

A. Latar Belakang TKI ke Luar Negeri

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, dimana pada tahun 2013-2015 jumlah penduduk di negara indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk indonesia sebesar 252 juta orang, jumlah ini terus meningkat pada tahun selanjutnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia kembali mengalami peningkataan yang cukup signifikan, dimana terdapat peningkatan sekitar 3,1 juta orang dan menjadi sebesar 255, 1 juta orang pada tahun tersebut. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah penduduk Indonesia hingga mencapai angka 258, 2 juta. Akan tetapi peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan, hal ini membuat banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan pencarian kerja. Persaingan kerja antara penduduk Indonesia terus memanas dari tahun 2013-2015 tidak jarang banyak calon pekerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan akhirnya menjadi pengangguran.

Bidang pekerjaan merupakan hal erat kaitanya dengan kata persaingan, yang mana di Indonesia bidang pekerjaan menjadi persaingan yang paling ketat. Hal ini terjadi tidak lain karena meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja. Masalah lapangan kerja di Indonesia sendiri sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya dan belum dapat/sulit diatasi oleh pemerintah Indonesia mengingat peningkatan jumlah

penduduk setiap tahunnya. Menciptakan lapangan kerja sejatinya menjadi tugas pemerintah untuk dapat mengurangi angka kemiskinan, akan tetapi hal itu sulit untuk terealisasi karena sudah terlalu banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. (Nesa, 2018)

Permasalahan tentang kurangnya lapangan kerja bagi penduduk Indonesia menjadi salah satu faktor yang mendasari warga negara Indonesia untuk menjadi TKI. Permasalahan mengenai kurangnya lapangan pekerjaan jelas menjadi faktor pendorong untuk menjadi TKI, mengingat kebutuhan ekonomi yang setiap harinya semakin tinggi memaksa penduduk untuk terus bekerja demi kebutuhan sehari-harinya. Dengan banyaknya jumlah penduduk serta sedikitnya lapangan pekerjaan membuat meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Masalah pengangguran di Indonesia sejatinya menjadi masalah yang sulit diatasi oleh Indonesia dari beberapa tahun sebelumnya. Pengangguran sendiri sebenarnya dapat diatasi dengan memperluas lapangan pekerjaan akan tetapi hal tersebut sulit direalisasikan, hal ini karena jumlah penduduk di Indonesia yang terus meningkat tanpa dibarengi dengan peningkatan lapangan pekerjaan. Indonesia harus melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi masalah pengangguran karena tanpa adanya kerjasama dengan negara lain pengangguran akan sulit diatasi mengingat jumlah penduduk di Indonesia yang sudah terlalu banyak serta kurangnya lahan pekerjaan di Indonesia. (Putra E. P., 2014)

Indonesia sendiri telah mengambil sebuah tindakan untuk mengatasi permasalahan tentang lapangan pekerjaan, langkah yang diambil Indonesia yaitu dengan mengirimkan tenaga kerjanya (TKI) untuk bekerja di luar negeri dengan syarat dan prosedur penempatan tenaga kerja yang benar. Dengan pengiriman tenaga kerja keluar negeri akan mengurangi persaingan kerja di Indonesia, ditambah lagi pengiriman tenaga kerja keluar negeri juga dapat meningkatkan devisa negara oleh karena itu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dapat dikatakan tepat.

Pengiriman tenaga kerja keluar negeri terbukti telah berhasil untuk mengurangi angka pengangguran dikarenakan persaingan kerja yang menurun. Dengan adanya pengiriman tenaga kerja keluar negeri secara tidak langsung membuat persaingan kerja di Indonesia berkurang walaupun belum dapat dikatakan berkurang secara drastis. (Putra I. R., 2014)

Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di seluruh dunia mengalami peningkatan sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. "Jumlah TKI yang bekerja di sektor formal diberbagai negara mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan laporan BNP2TKI pada tahun 2013 jumlah TKI mencapai 512.168 orang, yang terdiri dari 285.197 orang TKI formal (56%) dan 226.871 orang TKI informal (44%). Sedangkan pada tahun tahun 2012 TKI mencapai 494.609 orang yang terdiri dari 258.411 TKI formal (52%) dan 236.198 TKI informal (48%)," ungkap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. (Finance, 2014)

Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2014 jumlah TKI mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) penempatan TKI selama empat terakhir yakni dari 2011–2014 terjadi naikturun, pada 2011 sebanyak 586.802 orang, 2012 sebanyak 494.609 orang, 2013 sebanyak 512.168 orang, dan 2014 sebanyak 429.872 orang. Dari jumlah tersebut terjadi penurunan terhadap TKI formal menjadi 247.610 orang dan pada sector informal juga mengalami penurunan menjadi sejumlah 182.262 TKI informal. (BNP2TKI, 2016)

Di tahun 2015 terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja di Malaysia menjadi 275.236 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut sector TKI formal mengalami penurunan yang lumayan banyak menjadi 152.394 orang, sedangkan pada sector informal juga mengalami penurunan menjadi 123.342 tenaga kerja. Hal ini tentunya terjadi bukan tanpa alasan, banyaknya kasus yang terjadi terhadap TKI pada tahun 2013 hingga tahun 2015 diyakini menjadi faktor utama mengapa jumlah TKI terus mengalami penurunan. (BNP2TKI, 2016)

Kepala Puslitfo BNP2TKI Muhammad Hidayat mengatakan secara bertahap terjadi kenaikan persentase penempatan TKI formal dan penurunan TKI informal. Pada 2011 TKI formal 45% dan pada 2014 naik menjadi 58%. Adapun persentase TKI informal pada 2011 sebanyak 55% dan tahun 2014 turun menjadi 42%. Penurunan TKI informal ini sendiri terjadi karena pembenahan penempatan TKI di timur tengah serta diberlakukannya kebijakan moratorium TKI informal yang bekerja pada sektor penata rumah tangga. Kemudian pada tahun 2015 Jumlah TKI kembali mengalami penurunan yang cukup drastis hal ini masih disebabkan oleh Kebijakan Moratorium tersebut. (Arief, 2015)

Jumlah TKI Formal dan Informal pada tahun 2011-2015

NO	TAHUN	JUMLAH TOTAL TKI YG DILAYANI	TKI FORMAL	%	TKI INFORMAL	%
1	2011	586.802	266.191	45	320.611	55
2	2012	494.609	258.411	52	236.198	48
3	2013	512.168	285.297	56	226.871	44
4	2014	429.872	247.610	58	182.262	42
5	2015	275.736	152.394	55	123.342	45

Tabel 3.1 Jumlah TKI Formal dan Informal pada tahun 2011-2015

Sumber data: Subbid Pengolahan Data , Bidang Pengolahan dan Penyajian Data (PUSLITFO BNP2TKI)

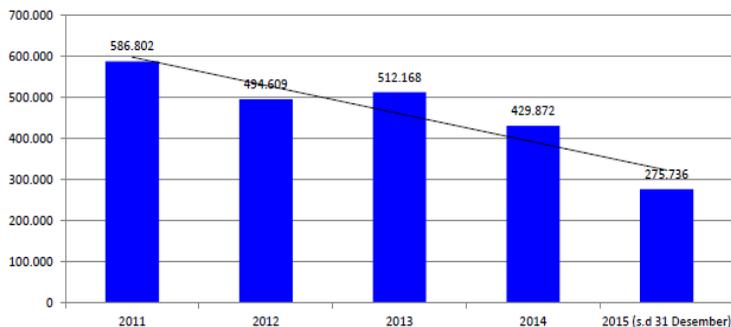


Diagram 1 Fluktuasi jumlah TKI tahun 2011-2015
Sumber data: Subbid Pengolahan Data , Bidang
Pengolahan dan Penyajian Data (PUSLITFO BNP2TKI)

Dari sekian banyak TKI yang bekerja di luar negeri, Malaysia menjadi negara dengan pengguna jasa TKI terbanyak pada tahun 2013-2015. Dimana dari tahun 2013 hingga tahun 2015 jumlah TKI yang bekerja di Malaysia terus mengalami peningkatan dan Malaysia juga menjadi negara favorit calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai negara salah satunya Malaysia. Dengan adanya kerjasama dua negara ini diharapkan akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan baik pekerjaan dalam negeri maupun pekerjaan yang berada di luar negeri. Tingginya antusias masyarakat yang berkeinginan untuk mengadu nasib dan mendapatkan penghasilan yang besar tidak lain dikarenakan dengan penghasilan yang besar maka dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan terbebas dari jurang kemiskinan. (BNP2TKI, 2016)

B . Faktor-Faktor Dasar TKI Bekerja di Malaysia

Tenaga kerja Indonesia atau yang sering kita sebut dengan nama TKI merupakan salah satu penyumbang devisa yang tinggi bagi negara, menurut data yang dikeluarkan oleh bank dunia pada tahun 2013 TKI menyumbang Rp 101,5 Triliun kemudian naik lagi di tahun 2014 menjadi Rp 114 Triliun dan meningkat drastis pada tahun 2015 menjadi Rp 140 Triliun. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya

jumlah TKI yang bekerja di luar negeri setiap tahunnya yang membuat angka devisa terus meningkat.

Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

NO	NEGARA	2012	2013	2014	2015
1	MALAYSIA	134,069	150,250	127,827	97,635
2	TAIWAN	81,071	83,544	82,665	75,303
3	SAUDI ARABIA	40,655	45,394	44,325	23,000
4	HONG KONG	45,478	41,769	35,050	15,322
5	SINGAPORE	41,556	34,655	31,680	20,895
6	UNITED ARAB EMIRATES	35,888	44,505	17,962	7,619
7	QATAR	20,380	16,237	7,862	2,460
8	KOREA SELATAN	13,593	15,374	11,848	5,501
9	UNITED STATES	15,353	15,021	9,233	1,029
10	OMAN	8,836	10,719	19,141	6,766
11	BRUNEI DARUSSALAM	13,146	11,269	11,616	9,993
12	BAHRAIN	6,328	5,384	5,472	2,570
13	JAPAN	3,293	3,042	2,428	468
14	ITALY	3,691	3,746	1,295	1,516
15	KUWAIT	2,518	2,534	1,714	210
16	CHINA	1,967	2,055	915	108
17	SPAIN	1,746	1,417	889	268
18	TURKEY	1,209	1,518	1,246	1,108
19	SOUTH AFRICA	1,388	905	587	113
20	MAURITIUS	982	1,017	838	144
21	THAILAND	1,035	1,041	717	90
22	NETHERLANDS	798	1,176	796	52
23	FIJI ISLANDS	970	848	902	246
24	AUSTRALIA	945	1,012	644	77
25	GERMANY	697	1,168	556	194
26	LAINNYA	17,017	16,568	11,664	3,049
TOTAL		494,609	512,168	429,872	275,73

Tabel 3.2 Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Sumber: (BNP2TKI, 2016)

Dari data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) tersebut terlihat bahwa Malaysia menjadi tujuan favorit calon TKI untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri, hal ini dapat dilihat dari jumlah TKI yang bekerja di Malaysia dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Malaysia merupakan negara dengan jumlah TKI terbesar dari tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalahkan negara-negara lain seperti Taiwan, Saudi Arabia, Hongkong dll, hal ini tentunya didasari karena berbagai faktor yang mana membuat calon TKI menjadi cenderung lebih memilih Malaysia dibandingkan dengan negara-negara lain. Akan tetapi dari data diatas juga dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2013 hingga tahun 2015, hal ini terjadi mengingat banyaknya kasus yang terjadi di Malaysia pada tahun tersebut. (BNP2TKI, 2016)

Malaysia menjadi tujuan favorit para calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Ada beberapa faktor yang membuat Malaysia menjadi tujuan favorit para calon TKI. Faktor yang pertama adalah letak geografis, dimana letak geografis Malaysia cukup dekat dengan Indonesia yang membuat calon TKI memilih Malaysia. Letak yang berdekatan menjadi daya tarik tersendiri bagi calon TKI karena perjalanan tidak memerlukan waktu tempuh yang lama dan disamping tenaga kerja tersebut juga lebih merasa aman karena negara tempat dia bekerja berdekatan dengan negara asalnya. Terlebih lagi biaya untuk perjalanan dari Indonesia ke Malaysia atau sebaliknya relatif murah, hal ini memudahkan tenaga kerja apabila ingin pulang ke negaranya ataupun kembali ke Malaysia.

Faktor yang kedua adalah bahasa yang digunakan di Malaysia, bahasa yang digunakan di Malaysia merupakan bahasa melayu dimana bahasa tersebut memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia hal tersebut dapat membuat TKI tidak akan mengalami kesulitan untuk mempelajari bahasa yang digunakan di Malaysia sekaligus menjadi daya tarik bagi

calon TKI untuk bekerja di Malaysia. juga menjadi faktor yang menjadi daya tarik bagi TKI untuk bekerja di Malaysia. (Huda, 2017)

Faktor yang ketiga adalah banyaknya jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di Malaysia. Lowongan pekerjaan sejatinya menjadi permasalahan utama bagi tenaga kerja Indonesia karena di negara tempat asalnya yaitu Indonesia lowongan pekerjaan adalah hal yang sulit untuk ditemukan. Terlebih lagi jumlah tenaga kerja di Malaysia terbilang sedikit bila dibandingkan dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, hal ini jelas menjadi peluang bagi pendatang dari luar Malaysia terutama bagi pekerja asal Indonesia. Sedikitnya tenaga kerja dan banyaknya lowongan kerja jelas membuat persaingan kerja di Malaysia dapat dikatakan rendah dan menjadi peluang kerja bagi TKI.

Faktor yang terakhir adalah karena biaya untuk bekerja di Malaysia lebih murah daripada ke negara lain, hal ini didasari oleh letak geografis Malaysia yang berdekatan dengan Indonesia. Letak geografis yang berdekatan membuat biaya untuk pergi ke Malaysia dapat dikatakan murah, ditambah lagi biaya hidup di Malaysia juga dapat dikatakan murah karena tingkat prekonomian di Malaysia hampir sama dengan di Indonesia. (Huda, 2017)

C. Permasalahan TKI di Malaysia

Banyak sekali permasalahan terhadap TKI yang berada di Malaysia, dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2015 sendiri jumlah permasalahan TKI di Malaysia terus mengalami peningkatan. Permasalahan mengenai TKI ilegal merupakan salah satu permasalahan yang terus menjamur sejak 3 tahun terakhir, selain itu permasalahan mengenai sinkronisasi proses penyaluran TKI dari Indonesia ke Malaysia juga menjadi permasalahan yang tidak dapat dianggap enteng oleh kedua negara.

1. Permasalahan TKI ilegal di Malaysia

A. Masalah Tenaga Kerja Indonesia Ilegal di Malaysia

Salah satu permasalahan terbesar dalam pengiriman TKI ke luar negeri khususnya Malaysia ialah keberadaan tenaga

kerja ilegal yang merupakan hasil dari kegagalan dari pemerintah dalam memberikan pelayanan, pengawasan dan monitoring pengiriman TKI ke luar negeri. Faktor utama penyebab maraknya pengiriman TKI secara ilegal sebenarnya adalah mahal dan ribetnya birokrasi pengurusan penempatan TKI di luar negeri melalui jalur resmi, sehingga calon TKI lebih memilih jalur ilegal yang mana proses dan syaratnya lebih mudah. Kian banyaknya pengiriman TKI ilegal ke Malaysia dikarenakan oleh tidak ketatnya pelayanan dalam sistem penempatan TKI yang dilakukan oleh para penanggung jawab kepada calon TKI yang ingin bekerja ke Malaysia. (Saihu, 2011)

Pemerintah Malaysia sendiri telah mengklasifikasikan jenis-jenis TKI ilegal, 4 model TKI ilegal menurut pemerintah Malaysia yaitu tipe pengelak, tipe teraniaya, tipe penyelundup, dan kucing-kucingan. *Pertama*, tipe pengelak adalah tenaga kerja Indonesia yang tertangkap oleh aparat hukum Malaysia dikarenakan tinggal di Malaysia melebihi batas waktu yang telah ditentukan di perjanjian pekerjaan. TKI jenis ini bekerja menggunakan penyaluran resmi akan tetapi ketika kontraknya berakhir TKI ini tidak memberikan laporan dengan alasan ingin tetap bekerja di Malaysia di tempat lain tanpa mengurus perpanjangan dokumen yang dimilikinya.

Kedua, tipe teraniaya yaitu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia melalui penyaluran resmi sebagai pekerja, akan tetapi dokumen keimigrasian yang dimilikinya hilang karena berbagai macam alasan. Misalnya seperti mempunyai masalah dengan majikan atau agen atau karena alasan lain sehingga TKI tersebut melarikan diri akan tetapi paspor milik TKI tersebut ditahan sebagai jaminan agar tidak melakukan hal yang menyimpang. Akan tetapi cara tersebut menjadi modus untuk memeras TKI seperti kasus-kasus yang banyak terjadi belakangan ini perihal gaji yang tidak dibayar. Dan apabila sudah tidak senang majikannya memberitahukan petugas keamanan Malaysia untuk menangkap.

Ketiga, tipe penyelundup yaitu para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia tanpa memiliki dokumen

resmi karena diberangkatkan melalui jalur penyaluran tidak resmi Dan yang *terakhir*, adalah tipe kucing-kucingan dimana TKI yang berada di Malaysia dalam urusan kunjungan resmi akan tetapi dimanfaatkan oleh majikan untuk melakukan pekerjaan. Sebelum masa 30 hari habis, dia kembali ke Indonesia lalu datang kembali beberapa hari kemudian. Dalam razia, TKI tipe ini juga akan ditangkap karena tidak memiliki izin atau kartu pekerja asing.

Menurut international Labour Organization (ILO), terdapat beberapa faktor yang mendasari calon TKI lebih memilih untuk menggunakan jalur penyaluran ilegal diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Terbatasnya informasi akurat dan tidak adanya akses yang dapat diandalkan oleh calon TKI,
- (2) Kurangnya waktu yang dimiliki oleh calon TKI untuk menggunakan jalur penyaluran resmi,
- (3) Prosedur atau syarat yang diberikan oleh jalur penyaluran resmi cenderung menyulitkan calon TKI,
- (4) Kebijakan migrasi yang dibatasi, mengakibatkan calon TKI untuk mencari jalur-jalur penyaluran ilegal, membuat calon TKI menjadi lebih rentan terhadap jebakan pelaku perdagangan,
- (5) Kurangnya biaya yang dimiliki calon TKI untuk menggunakan jalur resmi,
- (6) Sifat pekerjaan yang terkadang memaksa calon TKI yang ingin menjadi TKI bergantung pada perekrut dan agen yang meragukan atau palsu,
- (7) Perekrut ilegal juga secara aktif lebih memilih perempuan karena mereka lebih polos dibandingkan dengan laki- laki.

Selain beberapa alasan diatas, terdapat beberapa faktor lain yang mendasari TKI memilih jalur penyaluran ilegal yaitu efisiensi. Efisiensi yaitu dapat lebih cepat untuk bekerja di Malaysia dengan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan jalur resmi, disamping itu TKI beranggapan bahwa prosedur yang harus dilewati jika menggunakan jalur resmi terlalu berbelit-belit. Ditambah lagi mahalnya biaya

yang harus dikeluarkan dan waktu yang terlalu lama tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan di pengurusan dokumen.

Permasalahan TKI ilegal di Malaysia tidak hanya menjadi dilema bagi Indonesia akan tetapi juga menjadi dilema bagi pemerintahan Malaysia dalam mengambil sebuah keputusan. Hingga sekarang pemerintah Malaysia tidak mengeluarkan pernyataan tegas terkait pemberhentian TKI ilegal di negeri jiran tersebut. Hal ini terjadi karena pada faktanya Malaysia sangat membutuhkan TKI untuk mengisi pekerjaan yang tersedia karena pekerja asli Malaysia lebih sedikit bila dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kasus pemulangan ribuan TKI ilegal terbukti menyebabkan banyak pekerjaan di lahan perkebunan dan pembangunan sejumlah gedung terbengkalai. (Liputan6, 2002)

Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia dapat dikatakan banyak, hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) dimana jumlah tenaga kerja Indonesia mencapai 134.069 ribu orang. Hal ini dikarenakan Malaysia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup sedikit bila dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja di negeri jiran tersebut, berbanding terbalik dengan Indonesia yang kekurangan lapangan kerja sehingga harus mengirim pekerjaanya ke luar negeri. (BNP2TKI, 2016)

Banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia menimbulkan banyak sekali kasus yang terjadi di Malaysia terutama masalah tenaga kerja ilegal, dimana pada tahun 2013 sebanyak 5.218 pekerja ilegal asal Indonesia ditangkap oleh aparat hukum Malaysia karena tidak jelasnya identitas pekerja tersebut. Razia terhadap tenaga kerja ilegal ini merupakan lanjutan setelah program pemutihan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia untuk menekan angka tenaga kerja ilegal. Program pemutihan atau 6P (pendaftaran, pemutihan, pengampunan, pemantauan, penguatkuasaan, dan pemulangan) sendiri merupakan program prosedural bagi

tenaga kerja yang tidak jelas asal-usulnya menjadi memiliki identitas yang jelas.

Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengatakan dari jumlah tersebut 929 TKI telah diusir dan hampir 4.000 orang masih ditahan untuk pemeriksaan. “Kita menjalankan program pemutihan ini untuk mengenal pasti jumlah pendatang asing tanpa izin. Untuk sekarang ini dalam program pemutihan kita telah berjaya (berhasil) memutihkan 500.000 pekerja,” kata Datuk Wan Junaidi. Di antara jumlah tersebut, TKI menduduki kelompok kedua yang diputihkan sebanyak 201.000, hal ini terjadi karena banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Akan tetapi melihat banyaknya masalah yang muncul seperti penipuan yang dilakukan agen-agen swasta yang ditunjuk untuk menangani proses ini, ketidaktahuan para pekerja untuk program pemutihan ini dan ijin dari majikan tempat bekerja untuk mengikuti program ini membuat banyak pihak menganggap program ini tidak berhasil. (Bonatsir, 2013)

Tahun 2014 merupakan tahun yang buruk bagi tenaga kerja Indonesia di Malaysia, dimana pada tahun ini jumlah tenaga kerja Indonesia menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena banyaknya kasus yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia pada tahun 2013, akan tetapi terjadi peningkatan terhadap tenaga kerja ilegal di Malaysia. Pada tahun ini sebanyak 704 TKI ilegal dipulangkan karena tidak jelasnya identitas mereka karena kebanyakan TKI ilegal tidak mengikuti program legalisasi dan e-kad dari Malaysia, meskipun hal ini dikarenakan syarat yang diberikan pemerintah Malaysia cenderung menyulitkan TKI. Pemulangan TKI ilegal ini akan dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama memulangkan sebanyak 494 orang dan pada tahap kedua akan memulangkan 209 orang.

Pemulangan TKI ini merupakan hasil pertemuan Menteri Ketenagakerjaan RI, Hanif Dhakiri dan Menteri Dalam Negeri Dato’ Seri Ahmad Zahid bin Hamidi pada 18 Desember 2014. Pemulangan TKI ilegal dari Malaysia ini juga sebagai pelaksanaan dari arahan Presiden Joko Widodo yang

meminta para TKI ilegal untuk kembali ke Indonesia agar tidak menghadapi masalah hukum di negara lain. (Kompas, 2014)

Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia mulai memperhatikan sektor tenaga kerjanya, dimana pada tahun ini pemerintah Indonesia mengupayakan untuk dapat mengatasi masalah TKI ilegal terutama pada kasus TKI ilegal di Malaysia yang terus meningkat dari tahun 2013 hingga 2015 dan menurunnya jumlah TKI yang bekerja di Malaysia. Pemerintah Indonesia akhirnya mengadakan sebuah pertemuan dengan pemerintah Malaysia, Indonesia sendiri diwakili oleh presiden Joko Widodo dan perwakilan Malaysia untuk pertemuan tersebut yaitu perdana menteri Nazab Razak di Putrajaya Malaysia.

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2015, pertemuan dimaksudkan untuk membahas mengenai masalah TKI ilegal di Malaysia. Dalam pertemuan ini kedua negara bersedia untuk mendorong upaya-upaya perlindungan yang lebih baik terhadap TKI diantaranya melalui penguatan pengiriman tenaga kerja melalui sarana legal dan prosedural. Kedua negara sepakat untuk membuat suatu kebijakan untuk membatasi penyaluran dan penerimaan tenaga kerja di Malaysia, kebijakan ini dinamakan Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu. Dengan adanya kebijakan ini dikeluarkan dan disepakati oleh kedua negara yang mana kebijakan ini membuat penyaluran tenaga kerja Indonesia (TKI) hanya melalui satu jalur saja dan perekrutan juga hanya melalui satu jalur saja. (Santosa, 2015)

B. Masalah Banyaknya Penyaluran dan Penerimaan TKI Ilegal di Malaysia

Permasalahan yang mendasari munculnya TKI ilegal adalah penggunaan calo atau sponsor. Keterlibatan calo dalam proses pengiriman TKI ke luar negeri merupakan salah satu faktor dari kegagalan pemerintah menyediakan jalur penyaluran bagi tenaga kerja yang ingin bekerja di Malaysia. Selain itu lemahnya pengawasan serta hukuman terhadap Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia Swasta (PPTKIS) yang menggunakan jasa calo juga menjadi pendorong munculnya calo dalam proses pengiriman TKI. BNP2TKI mengakui bahwa eksploitasi yang terjadi terhadap TKI tidak terlepas dari banyaknya PPTKIS yang menggunakan “calo” dalam proses perekrutan, dan juga lemahnya pengawasan dari pemerintah juga menjadi salah satu faktor eksploitasi tersebut.

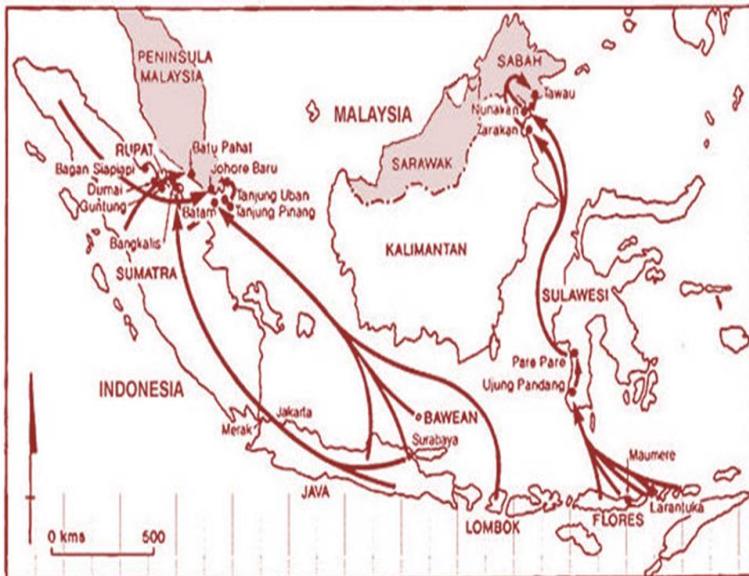
Permasalahan utama dalam proses penyaluran TKI ilegal adalah banyaknya dominasi calo yang dapat bergerak dengan bebas dalam proses mekanisme ketenagakerjaan, meliputi perekrutan, persiapan, dan keberangkatan serta kepulangan TKI. Proses tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan jasa calo yang menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan, tidak sedikit pula yang memanipulasi ataupun memalsikan dokumen untuk dapat mengirimkan tenaga kerja keluar negeri.

Semakin meningkatnya calon tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri, memunculkan banyak permasalahan seperti munculnya perusahaan penyaluran tenaga kerja swasta (PPTKIS). Akan tetapi tidak semua PPTKIS telah terdaftar di dinas tenaga kerja, tingginya keinginan TKI untuk dapat bekerja di luar negeri seringkali disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencari keuntungan sendiri. Banyaknya jalur penyaluran ilegal menjadi jalan pintas mudah bagi calon tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri tanpa harus melewati jalur resmi yang memberikan syarat-syarat yang dapat dikatakan berbelit-belit.

Gambar:

Jalur-Jalur penyaluran atau migrasi antara Indonesia dan Malaysia

(Panah-panah tersebut menunjukkan jalur-jalur migrasi dari Indonesia ke titik-titik transit masuk ke Malaysia, yaitu wilayah abu-abu.)



Gambar 1 Peta Jalur penyaluran atau migrasi antara Indonesia dan Malaysia

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan bahwa Batam menjadi pintu gerbang utama bagi TKI ilegal untuk bekerja ke luar negeri terutama tujuan Malaysia. Para calon TKI datang ke Batam dari berbagai macam wilayah di Indonesia untuk mendaftarkan diri agar dapat bekerja ke luar negeri secara mudah, calon TKI ilegal juga memanfaatkan fasilitas bebas visa agar bisa bekerja di Malaysia tanpa harus memiliki dokumen lengkap dan surat keterangan tenaga kerja luar

negeri (KTLKLN) yang hanya diterbitkan bagi calon TKI yang memenuhi syarat. (Larno, 2014)

Pelabuhan Internasional Batam Centre mempunyai beberapa pelayaran langsung dari Batam menuju Johor Bahru Malaysia, hal ini sering dimanfaatkan oleh penyalur TKI ilegal dengan tujuan mengirim tenaga kerja ke negeri jiran tersebut. Modus/metode yang digunakan oleh penyalur TKI ilegal yaitu para calon tenaga kerja terlebih dulu pergi menuju ke Batam dengan pesawat dari daerah calon TKI tersebut. Sesampainya di bandara Internasional Hang Nadim Batam para calon TKI akan digiring untuk menggunakan kapal feri dengan tujuan Johor Malaysia dari pelabuhan Internasional Batam Centre yang berdekatan dengan bandara Internasional Hang Nadim. Pengawasan penyaluran TKI yang ingin bekerja di Malaysia dapat dikatakan sangat longgar, hal ini menjadi kesempatan bagi para calo untuk mengirimkan tenaga kerjanya secara ilegal. Tidak adanya peran aparat fungsional dalam mengawasi penyaluran tenaga kerja membuat banyak sekali penyimpangan yang terjadi dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri khususnya Malaysia.

C. Masalah Tentang Perlindungan TKI di Malaysia

Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sejatinya harus menjadi jaminan penuh bagi tenaga kerja apabila bekerja di luar negeri, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi pada TKI yang bekerja di Malaysia pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Keadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia terbilang sangat memprihatinkan dari beberapa tahun terakhir, kurangnya perhatian pemerintah menjadi faktor pendorong hal tersebut. Pemerintah dinilai kurang mempedulikan nasib TKI di negara lain dan akan mulai bergerak apabila sebuah kasus terjadi kepada TKI dan telah muncul di kalangan masyarakat.

Malaysia merupakan dengan jumlah pengguna jasa tenaga kerja Indonesia terbanyak pada tahun 2013 hingga 2015, hal ini tentunya tidak lepas dari begitu mudahnya bagi para TKI untuk bekerja di negeri jiran tersebut. Akan tetapi pada kurun waktu tersebut terdapat masalah yang serius yaitu

masalah kematian TKI, menurut data dari BNP2TKI pada rentang waktu 3 tahun dari tahun 2013 hingga 2015 terdapat 394 TKI yang mengalami kematian di negara tersebut. Ditambah lagi tercatat bahwa TKI di Malaysia merupakan tenaga kerja yang paling sering membuat pengaduan ke BNP2TKI dalam kurun waktu tersebut. (Rochim, 2018)

Pengaduan tenaga kerja Indonesia di Malaysia sendiri terjadi karena banyaknya penyiksaan terhadap TKI, penganiayaan ini terjadi karena tidak adanya aturan hukum yang melindungi TKI di Malaysia. Lemahnya hukum yang ada di Malaysia membuat tenaga kerja diperlakukan semena-mena mulai dari dipaksa bekerja melebihi waktu kerja yang terdapat dalam kesepakatan kerja, tidak adanya hari libur/cuti bagi para TKI, dan perlakuan kasar dari majikan. Ditambah lagi tidak adanya jaminan dari agen penyaluran tenaga kerja resmi menjadi salah satu faktor yang membuat terjadinya penganiayaan terhadap TKI di Malaysia.

Agen penyalur yang seharusnya memberi jaminan keamanan dan perlindungan bagi TKI justru lebih mementingkan untuk mengirim calon TKI secepat-cepatnya tanpa adanya pelatihan sebelum diberangkatkan dan juga perlindungan ketika berada di negara tempat bekerja. Adanya penyaluran tenaga kerja ilegal kian memperkeruh nasib TKI di Malaysia, hal ini karena tidak jelasnya pekerjaan yang akan dilakukan di Malaysia dan tidak sedikit calon TKI yang menjadi teraniaya dan tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja. (Rochim, 2018)

2. Permasalahan Proses Penyaluran dan Penerimaan TKI di Indonesia dan Malaysia

Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mengatasi tenaga kerja ilegal asal Indonesia dapat dikatakan sangat kurang, baik Indonesia dan Malaysia dari tahun 2013 hingga tahun 2014 lebih memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut secara individu. Hal ini membuat penanganan terhadap TKI ilegal dapat dikatakan tidak maksimal karena tidak adanya sinkronisasi proses

penyaluran baik dari Indonesia maupun dari Malaysia itu sendiri.

Pada tahun 2013 sendiri pemerintah Malaysia mengadakan razia bagi para TKI ilegal yang merupakan implementasi lanjutan dari program legalitas dokumen dan program e-kad, program ini merupakan program yang dijalankan oleh pemerintah Malaysia tanpa adanya campur tangan dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Malaysia sendiri meyakini dengan adanya razia TKI ini akan dapat menekan angka TKI ilegal dan dapat menyelesaikan masalah tentang keberadaan TKI ilegal di Malaysia. Dengan adanya razia ini angka TKI ilegal mengalami penurunan akan tetapi razia ini tidak dapat dikatakan berhasil, hal ini dikarenakan banyaknya masalah yang muncul setelah razia ini dilakukan. (Sahana, 2013)

Pemerintah Indonesia merespon dengan buruk adanya razia ini, karena pemerintah Indonesia melihat bahwa razia ini hanya berfokus untuk mengusut para TKI ilegal akan tetapi tidak mengusut sama sekali tentang majikan yang memperkerjakan TKI tersebut. Hal ini dinilai oleh pemerintah Indonesia sebagai sebuah kegagalan karena keberadaan TKI ilegal tidak lepas dari kesalahan dari majikan yang menggunakan jasa TKI ilegal tersebut karena dapat menekan gaji/upah yang harus diberikan bila dibandingkan dengan TKI legal. Ketua Satgas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur Yusron B Ambary mengatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak boleh hanya berfokus dalam mengusut TKI dan juga harus mengusut majikannya, karena tidak sedikit dari para majikan yang tidak mengizinkan TKI ilegal untuk mengikuti program legalisasi dokumen ataupun e-kad agar tidak harus membayar upah yang lebih bagi TKI. (Ita, 2017)

Selain itu syarat yang terlalu menyulitkan bagi TKI ilegal untuk ikut dalam program legalisasi dokumen maupun e-kad menjadi salah satu faktor yang mendorong adanya penolakan TKI untuk ikut dalam program tersebut. Biaya yang terlalu mahal, proses yang berbelit-belit serta tidak adanya jaminan bagi para TKI ilegal apabila mengikuti akan

mengubah status mereka menjadi pendorong TKI menolak adanya program dan mengikuti program legalisasi dokumen dan e-kad

Tidak hanya pemerintah Indonesia yang meradang dengan adanya razia ini, akan tetapi salah satu TKI dan juga penggiat komunitas serantau di Malaysia Figo Kurniawan juga mengutarakan kekecewaan terhadap pemerintah Malaysia yang hanya mengusut TKI ilegal tanpa mengusut majikan yang memperkerjakannya. Menurut figo pemerintah Malaysia harus mengusut sampai ke akarnya dimana majikan merupakan pihak yang diusut pertama kali karena memperkerjakan TKI ilegal dan menjadi awal mula permasalahan TKI ilegal di Malaysia. (Amindoni, 2017)

Tidak hanya mengkritik razia yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, tapi Figo tidak lupa menyebut KBRI di dalamnya, pasalnya KBRI dinilai kurang aktif dalam membantu TKI di Malaysia. Dimulai dari program E-Kad hingga program legalisasi dokumen seharusnya KBRI di Malaysia telah melakukan pemetaan masalah dan secara proaktif turun ke lapangan untuk membantu TKI yang berada di Malaysia.

KBRI sendiri mengatakan bahwa pihaknya telah membantu TKI untuk dapat mengikuti program E-Kad maupun program legalisasi dokumen dan juga telah menawarkan pemulangan TKI ilegal secara sukarela, akan tetapi kebanyakan TKI ilegal tidak dapat mengikuti bantuan dari KBRI karena adanya resiko seperti TKI ilegal dapat masuk ke dalam daftar hitam/blacklist untuk bekerja kembali di luar negeri. Kurangnya kinerja KBRI dalam membantu TKI di Malaysia tidak terlepas dari tidak adanya campur tangan KBRI dalam program-program Malaysia untuk mengatasi TKI ilegal dan hanya dapat merespon setelah program tersebut berjalan. (Amindoni, 2017)

Pada tahun 2014 pemerintah Malaysia mengadakan program re hiring, program ini sendiri pernah dilakukan pada tahun 2011 dan dilakukan lagi pada tahun ini. Program ini mempunyai tujuan untuk menekan angka tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia mengingat terjadinyapeningkatan

tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia pada tahun 2013 hingga tahun 2014. Program ini sendiri merupakan program kerja dari pemerintah Malaysia sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah Indonesia, di samping itu program ini juga ditujukan untuk memberantas atau mengentaskan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) yang mana sebagian besar berasal dari Indonesia. (Suastha, 2017)

Program ini sendiri dinilai oleh pemerintah Malaysia sebagai jalan keluar untuk mengatasi permasalahan TKI ilegal maupun PATI di Malaysia, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Program ini justru dikecam oleh para TKI maupun PATI karena memberikan persyaratan yang menyulitkan apabila ingin mengikuti program ini, menurut Direktur Pperlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Lalu Muhammad Iqbal sendiri proses dari program re hiring terlalu bertele-tele dan juga banyaknya calo yang ingin mengambil keuntungan membuat TKI dan PATI harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk mengikuti proses dari program re hiring tersebut. “Animo TKI ilegal untuk ikut program pemutihan melalui rehiring ataupun voluntary deportation ini tidak terlalu tinggi. Salah satu yang dikeluhkan para TKI ilegal ini adalah proses rumit, biaya mahal lantaran banyak calo. Mereka juga belum tentu lolos rehiring,” kata Iqbal. (Suastha, 2017)

Selain itu proses penyaluran tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia juga dilakukan secara individu yang membuat tidak adanya kerjasama antara agen-agen dari Indonesia maupun agen-agen dari Malaysia. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor yang membuat adanya pihak ketiga diantara kedua negara tersebut, yang mana pihak ketiga tersebut justru membuat proses penyaluran dan penerimaan tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia menjadi mendapatkan berbagai macam kecurangan yang merugikan baik bagi kedua negara maupun bagi calon TKI itu sendiri.

Tidak adanya kebijakan yang mengatur tentang kerjasama proses penyaluran dan penerimaan tenaga kerja di Indonesia dan Malaysia membuat kedua negara tidak dapat

memantau secara langsung seluruh proses dari agen-agen yang berada di Indonesia dan juga agen-agen yang berada di Malaysia. Dimana kerjasama antara kedua agen dalam membuat sebuah proses bagi calon TKI untuk bekerja di Malaysia merupakan hal yang sangat penting, apabila kedua agen tidak membuat suatu kerjasama maka akan menyulitkan kedua agen untuk secara langsung mengawasi proses dari awal hingga akhir calon TKI tersebut.

Pada tahun 2013 hingga tahun 2015 calon TKI hanya mengandalkan satu agen saja yaitu agen dari Indonesia, dimana agen dari Indonesia pada kurun waktu tersebut hanya memperhatikan calon TKI sampai diberangkatkan saja. Hal ini tentunya menjadi mimpi buruk bagi calon TKI yang menggunakan agen dari Indonesia, karena setelah diberangkatkan dari agen yang berada di Indonesia nasib dari TKI tersebut sudah bukan menjadi tanggungan bagi agen dari Indonesia. Agen di Malaysia sendiri juga hampir sama dengan agen di Indonesia, dimana agen di Malaysia hanya bertanggungjawab terhadap TKI ketika bekerja dan berada di Malaysia. Hal ini tentunya menjadi masalah bagi TKI yang tidak mempunyai relasi di Malaysia karena akan kesulitan untuk mendaftar sebagai TKI apabila ingin melalui agen dari Malaysia, selain itu agen dari Malaysia juga tidak memberikan jaminan bagi TKI setelah kontrak kerja TKI tersebut telah habis. (Turyana, 2015)

Sebuah kerjasama antara kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia sangat diperlukan untuk mengatasi TKI ilegal dari segi kebijakan ataupun peraturan yang mengatur tentang proses penyaluran dan penerimaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, jika hanya salah satu pihak saja yang membuat kebijakan tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan sama seperti program-program sebelumnya baik dari Indonesia maupun Malaysia.